

Judul : Sikapi UU MD3, DPD bentuk Pansus Tatib
Tanggal : Rabu, 07 Maret 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Sikapi UU MD3, DPD Bentuk Pansus Tatib

JAKARTA—DPD RI menindaklanjuti kesepakatan Sidang Paripurna Ke-9 dalam Sidang Paripurna Ke-10, Selasa (6/3). Lembaga Senator ini membentuk Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) terkait hasil revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD 3) yang berimplikasi terhadap kewenangan DPD RI.

Pantauan, sidang paripurna yang berlokasi di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan itu dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dan didampingi Darmayanti Lubis selaku pimpinan DPD RI lainnya. Nono Sampono menyebutkan, pembentukan Pansus Tatib tersebut terkait perubahan kewenangan DPD RI semenjak revisi UU MD3 disahkan oleh DPR RI.

Dalam revisi UU MD3 itu, sambung Nono, DPD RI mendapatkan tugas baru selain penambahan satu orang pimpinan. DPD RI juga diberikan kewenangan untuk mengawasi mengevaluasi peraturan daerah (perda) serta pembentukan Raperda. "Dengan telah ditetapkannya keanggotaan Pansus Tatib, agar segera dilakukan rapat untuk pemilihan Pimpinan Pansus sehingga Pansus dapat segera melaksanakan tugasnya," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (6/3).

Dia juga menyebut, pada Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI sebelumnya telah memutuskan bahwa untuk komposisi anggota Pansus Tatib yakni, tujuh orang perwakilan dari Badan Kehormatan (BK) DPD RI. Mereka yakni, Mervin I.S Komber, Fahira Idris, I Gde Pasek Suardika, Dedy Iskandar Batubara, H. Leonardy Harmalmy Dt. Bandaro Basa, Adrianus Garu dan Basri Salama.



SIDANG—Pimpinan DPD RI Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis memimpin Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).

Selain itu, lanjutnya, ada enam orang dari perwakilan alat kelengkapan lainnya yang terdiri dari Akhmad Muqowam dari Komite I, Parlindungan Purba dari Komite II, H. Ajiep Padindang dari Komite IV, Intsiawati

Ayus dari BPKK, H. A. Budiono dari PURT dan Novita Anakkota dari BAP.

Nono dalam kesempatan itu menuturkan, selain membentuk Pansus Tatib untuk menindaklanjuti UU MD3, sidang paripurna DPD RI menyepakati sejumlah hal yang akan dibahas dalam masa sidang IV ini. Pertama, Komite I akan melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Melalui RUU ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan masyarakat adat di Indonesia sekaligus meningkatkan eksistensi dan kontribusi masyarakat adat dalam pembangunan," terangnya.

Selain itu, kata Nono, pada masa sidang ini Komite I akan menyusun RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diharapkan mampu memberi jawaban bagi ketimpangan pembangunan bagi daerah. "Penyusunan kedua RUU ini juga merupakan sikap DPD RI untuk mengelaborasi potensi masyarakat adat sebagai salah satu komponen utama pembangunan serta mewujudkan pemerataan bagi daerah," tegas Nono.

Ditambahkan, Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, untuk Komite II DPD RI, akan melanjutkan pembahasan RUU Kedaulatan Pangan dan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Dibidang pengawas-

an, Komite II juga akan melakukan pengawasan di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan pertanian.

Sedangkan Komite III, sambung Darmayanti, akan melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan Pasien dan RUU Perubahan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Komite III juga akan melanjutkan penyusunan Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Kebidanan. Selain itu, Komite III akan melakukan pengawasan atas UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan pengawasan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS khususnya mengenai BPJS Kesehatan. "Sedangkan Komite IV akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah dan RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dibidang pengawasan, Komite IV akan melakukan pengawasan UU terkait Lembaga Keuangan Syariah," paparnya.

Selain itu, masih menurut Darmayanti, Komite IV juga akan melakukan pembahasan Rekomendasi RKP tahun 2019 dan pembahasan Proyeksi Kebijakan Dana Transfer dalam RAPBN 2019 serta penyusunan pertimbangan terhadap Tindak Lanjut HAPSEM II BPK tahun 2017. Dalam sidang paripurna tersebut, urai Darmayanti, setiap senator menyampaikan laporan terkait kegiatan penyerapan aspirasi di daerah mereka masing-masing dalam masa reses. Beberapa permasalahan di daerah disampaikan untuk ditindaklanjuti melalui alat kelengkapan DPD RI. (aen)